

“Focus Group Discussion” dalam Paradigma Pembangunan Partisipatif

Dedeh Fardiah

ABSTRACT

Some recent years, the field of Development Communication has developed a bottom up approach in order to build a comprehensive program for stakeholders. The reason behind this approach is to generate participation among people who became their target. As a variant of participatory development, Focus Group Discussion has become an alternative for communication research method. In practice, Focus Group Discussion has great potential to achieve their optimum role. But, whoever employ this approach must also aware its limitations.

Kata kunci: focus group discussion, komunikasi pembangunan, paradigma partisipatif

Pendahuluan

Paradigma pembangunan pada masa lalu masih menggunakan pendekatan pembangunan dari atas (*top down*) dimana program yang dikembangkan di masyarakat direncanakan dan diturunkan oleh pihak lain atau orang luar, baik itu oleh pemerintah atau lembaga-lembaga yang bergerak dalam bidang pembangunan kepada pelaksana dan masyarakat. Walaupun program semacam itu didasarkan pada proses “penjajagan kebutuhan” masyarakat, tetapi penjajagan yang dilakukan hanyalah berdasarkan suatu survey atau penelitian akademis yang tidak melibatkan masyarakat secara berarti.

Pola pendekatan pembangunan dari atas ke bawah seperti itu seringkali menimbulkan permasalahan seperti:

1. Terjadinya ketidakcocokan antara para peneliti/pemrakarsa atau perancang program dengan pelaksana. Penelitian yang terlalu akademis

biasanya dipengaruhi oleh pola pikir dan pandangan penelitiannya sendiri, nilai terapannya kurang sehingga program yang dikembangkan tidak menjawab kebutuhan praktis yang sesungguhnya dirasakan masyarakat.

2. Masyarakat sasaran program hanya sebagai objek, karena keterlibatannya hanya sebagai pelaksana, sehingga mereka seringkali tidak merasa sebagai “pemilik” program. Akibatnya, dukungan masyarakat terhadap program seperti ini seringkali semu, demikian pula dengan partisipasi mereka.
3. Tidak adanya proses pembelajaran masyarakat dalam pengkajian, perencanaan dan pengorganisasian karena mereka hanya sebagai pelaksana. Dengan demikian, kurang menjamin keberlanjutan program karena prakarsa selalu datang dari “luar” dan keterampilannya tetap dimiliki “orang luar”. Beberapa tahun terakhir paradigma

pembangunan mulai bergeser dari pembangunan top down kepada pembangunan dari bawah (*bottom up*). Tetapi, pada kenyataannya paradigma baru yang berkembang ini masih dirasakan asing dan tidak lazim. Meskipun kata-kata partisipatif dan *bottom up* seiring didengung-dengungkan akan tetapi seringkali hanya menjadi jargon bagi lembaga pengembang program. Kenyataan ini bisa dilihat dari sikap, tindakan dan perilaku yang masih cenderung mengikuti pola pendekatan *top down*, sehingga pendekatan dari bawah seringkali menjadi semu dan dimanipulasi untuk kepentingan pihak-pihak tertentu.

Padaahal, apabila masyarakat dapat dilibatkan secara berarti dalam keseluruhan daur program, yaitu dari mulai kajian masalah/kebutuhan, perencanaan, pelaksanaan sampai dengan monitoring dan evaluasi program yang dikembangkan, akan menjadi lebih sesuai dengan kebutuhan masyarakat, rasa kepemilikan warga masyarakat terhadap program menjadi tinggi, juga keterampilan-keterampilan, analisis dan perencanaan tadi dipindahkan kepada masyarakat. Dengan demikian, di masa yang akan datang, ketergantungan masyarakat terhadap pihak "luar" dalam pengambilan prakarsa dan perumusan program secara bertahap akan bisa dikurangi sehingga diharapkan program yang dikembangkan akan lebih berkelanjutan.

Untuk memungkinkan terlaksananya pendekatan dari bawah dan meningkatkan partisipasi masyarakat dalam menanggulangi permasalahan, perlu dilakukan proses pemberdayaan masyarakat. Pemberdayaan masyarakat dilakukan untuk merubah masyarakat agar menjadi lebih mampu mengkaji masalah/kebutuhannya sendiri, memikirkan jalan keluar untuk memperbaiki keadaannya serta mengembangkan potensi-potensi dan keterampilan mereka untuk meningkatkan kesejahteraan hidupnya.

Salah satu indikasi terjadinya pemberdayaan masyarakat adalah kemampuan mereka dalam pengorganisasian kegiatan bersama untuk memecahkan permasalahan bersama. Pengorganisasian oleh masyarakat merupakan

bentuk kesadaran murni mereka untuk bertindak dan mengatasi masalah mereka atas dasar kepentingan bersama. Dengan demikian, akan terjadi proses pembelajaran yang bersamaan dengan proses peningkatan kesadaran dalam pemecahan masalah.

Pengoperasian masyarakat di sini diartikan sebagai pengorganisasian kesadaran, pengorganisasian potensi, pengorganisasian rencana, pelaksanaan dan monitoring evaluasi dari kegiatan masyarakat dalam rangka pemecahan masalah. Tujuan dari pengorganisasian masyarakat adalah untuk meningkatkan kemampuan interaksi mereka dengan pihak-pihak lain. Biasanya, tahapan yang harus dilakukan oleh pengembang program adalah dimulai dari situasi:

- (1) Masyarakat yang apatis, yaitu apabila mereka menyadari adanya masalah tetapi merasa tidak mampu mengatasinya;
- (2) menyadari bahwa dirinya adalah bagian dari pemecahan masalah;
- (3) tahap pembebasan di mana masyarakat mengaktualisasikan dirinya untuk mengambil peran dalam pemecahan masalah. (Modul Pelatihan, Survey Kampung Sendiri, Dinas Kimtawil, Kabupaten Bandung : 2001)

Dengan demikian, program perlu mengembangkan strategi pengorganisasian masyarakat yang bukan saja dapat memberdayakan masyarakat dalam arti peningkatan pengetahuan, perubahan sikap dan perilaku ke arah yang lebih maju tetapi juga pemberdayaan untuk dapat mengaktualisasikan diri dalam pemecahan masalah. Diharapkan, apabila ini terjadi masyarakat menjadi kuat dan mandiri, serta mengerti akan hak-hak mereka sehingga berlangsung dan keberlanjutan program akan lebih mengakar pada masyarakat.

Untuk memandirikan masyarakat agar mereka bisa mengorganisir kegiatan sendiri perlu strategi pemecahan masalah yang dapat meningkatkan keterampilan mereka agar tumbuh motivasi kolektif dan partisipasi masyarakat dalam mengatasi kemiskinan yang ada di wilayahnya.

Pendekatan pemberdayaan sebagaimana lazimnya perlu membentuk kelompok masyarakat

terorganisir (*organized Client*) sebagai pelaku utama pembangunan. Pembentukan kelompok terorganisasi dibutuhkan sebagai salah satu instrumen dalam rangka memberi akses secara lebih luas bagi kelompok masyarakat, sehingga seluruh keputusan dan tindakan pembangunan benar-benar didasarkan aspirasi masyarakat, kepentingan masyarakat, kemampuan masyarakat dan upaya masyarakat. Tahap pemberdayaan masyarakat secara umum dapat diidentifikasi, meskipun pada pelaksanaannya tergantung pada kondisi lokasi sasaran baik karena faktor sosial, budaya, ekonomi dan kepentingan program.

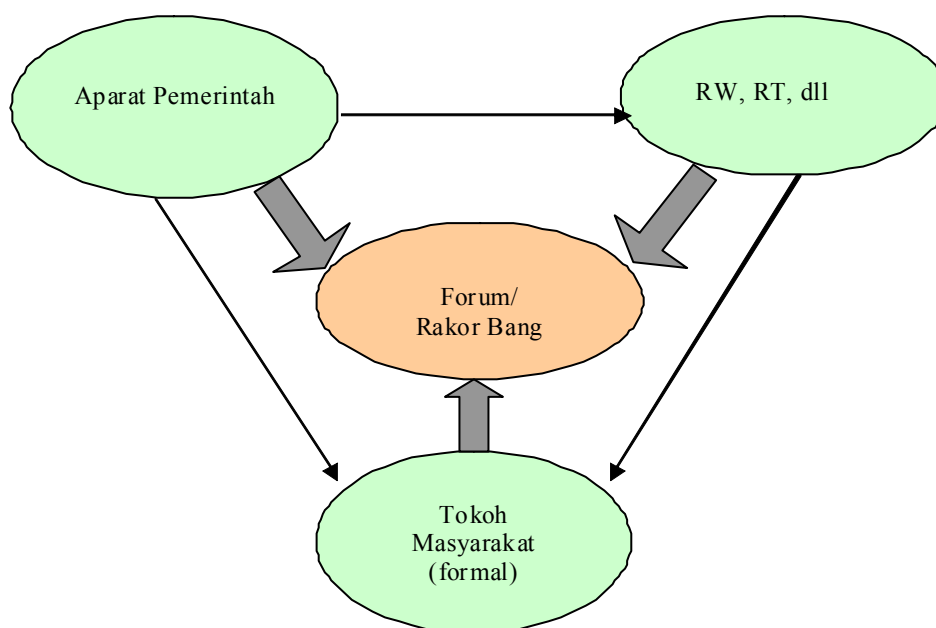
Pada masa lalu, keterlibatan masyarakat hanya berfokus pada kelompok-kelompok tertentu (gambar 1). Paradigma baru membuka kesempatan yang seluas-luasnya bagi pemerintah dan masyarakat untuk bersama-sama terlibat dalam proses pembangunan. Gambaran mengenai perubahan paradigma pembangunan yang

bertumpu pada konsep lama dan konsep baru dapat kita lihat pada perbandingan ilustrasi pada gambar 1.

Perbedaan mendasar pada gambar 1 tersebut, mencerminkan adanya perubahan yang signifikan dari pihak-pihak yang terlibat dalam proses pembangunan. Hal ini berimplikasi pada semakin dirasakan pentingnya komunikasi sebagai media penghubung antara pelaku-pelaku pembangunan.

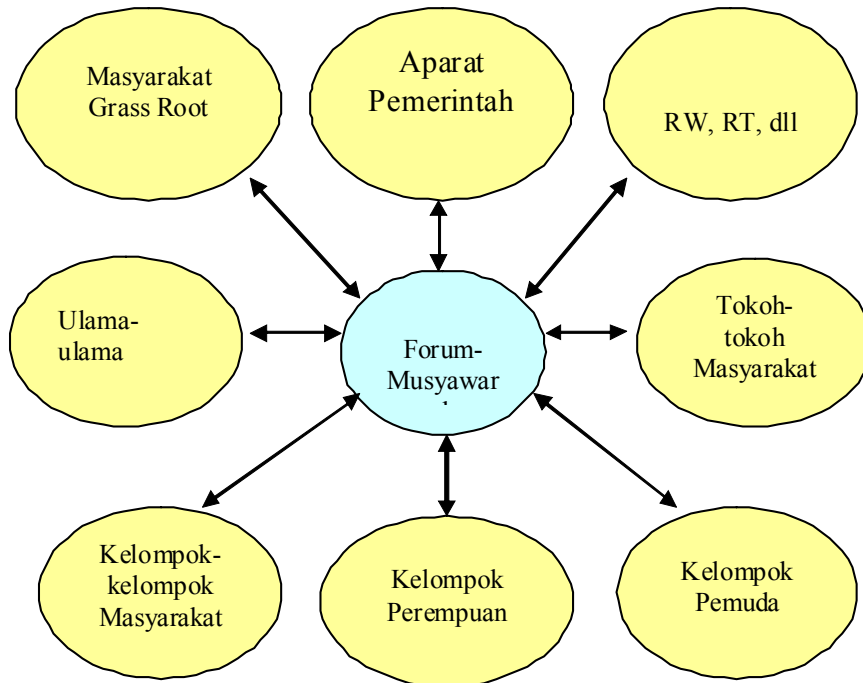
Komunikasi pembangunan merupakan pendekatan yang dikembangkan untuk pengembangan program pembangunan dengan tujuan meningkatkan pengetahuan, mengembangkan sikap dan mengubah perilaku masyarakat untuk mencapai peningkatan kesejahteraan hidup masyarakat. Pendekatan ini merupakan koreksi dan reaksi terhadap pendekatan pembangunan sebelumnya. Komunikasi pembangunan dianggap lebih tepat guna dan lebih memperhatikan masyarakat sebagai manusia

Gambar 1
Konsep Lama (Model Elit Pemerintahan)



Sumber : Modul Sosialisasi, 2001 : 31-32

Gambar 2
Konsep Baru Keterlibatan Masyarakat (semua Stakeholder)



Sumber: Modul Sosialisasi, 2001 : 31-32

(subjek) bukan target (objek) pembangunan. Beberapa metode dalam komunikasi pembangunan, yaitu: Pendekatan Kelompok, Diskusi Kelompok, Diskusi Pleno, Demonstrasi, dan sebagainya, merupakan media yang digunakan dalam pembangunan partisipatif.

Salah satu tujuan komunikasi pembangunan adalah mengubah keikutsertaan masyarakat dalam proses pembangunan. Keikutsertaan masyarakat yang diharapkan adalah keikutsertaan dari segenap lapisan masyarakat. Agar mampu menggugah keikutsertaan masyarakat, pendekatan melalui *Focus Group Discussion* dijadikan sebagai alternatif dalam pembangunan partisipatif. Dalam pelaksanaannya, *Focus Group Discussion* (*Diskusi Kelompok Terarah*) sebagai salah satu

metode dalam komunikasi pembangunan memiliki peluang yang amat besar untuk dioptimalkan peranannya namun banyak pula kendala yang mesti dihadapi. Berdasarkan fenomena yang telah dijabarkan maka penulis ingin mengkaji “Bagaimana *Focus Group Discussion* dalam paradigma pembangunan partisipatif”, dengan mengajukan beberapa pertanyaan:

- (1) Apa peranan *Focus Group Discussion* dalam paradigma pembangunan partisipatif?
- (2) Bagaimana proses *Focus Group Discussion* dalam paradigma pembangunan partisipatif?
- (3) Apa kendala-kendala pelaksanaan metode *Focus Group Discussion* dalam paradigma pembangunan partisipatif?

Kerangka Pemikiran

Pembangunan sebagai suatu fenomena sosial, menuntut perlakuan dan penanganan yang khusus, terutama mengangkat berbagai faktor yang mempengaruhinya seperti waktu, biaya, keterlibatan masyarakat, lingkup dan besaran kegiatan, serta efek yang ditimbulkannya bagi kehidupan sosial secara menyeluruh.

Pembangunan tampaknya dimaknai tidak semata sebagai usaha peningkatan kehidupan material namun juga bidang non material manusia, oleh karena itu konsep tentang pembangunan dalam kajian ini diartikan sebagai, “Suatu proses perubahan sosial yang bersifat partisipatori secara luas untuk memajukan keadaan sosial dan kebendaan (termasuk keadilan yang lebih besar, kebebasan dan kualitas yang dinilai tinggi yang lainnya, bagi mayoritas masyarakat melalui perolehan mereka akan kontrol yang lebih besar terhadap lingkungannya”. (Nasution, 1988 : 37)

Konsep yang lain diantaranya diungkapkan oleh *Dissayanake* (1981) menggambarkan bahwa pembangunan;

“...proses perubahan sosial yang bertujuan meningkatkan kualitas hidup dari seluruh atau mayoritas masyarakat tanpa merusak lingkungan alam dan kultural tempat mereka berada, dan berusaha melibatkan sebanyak mungkin anggota masyarakat dalam usaha ini dan menjadikan mereka penentu dari tujuan mereka sendiri”. (Nasution, 1988 : 92)

Pada hakekatnya, pembangunan merupakan suatu proses. Perencanaan adalah proses awal dari pembangunan. Perencanaan yang baik diharapkan akan menghasilkan pembangunan yang baik pula. Perencanaan yang baik akan ditentukan oleh tiga hal utama yang harus memadai, yaitu data/informasi yang memenuhi syarat, analisis yang tepat dan perumusan rencana yang dapat dipahami dengan baik oleh semua pihak yang berkepentingan. Hal tersebut akan terwujud apabila kegiatan perencanaan dilaksanakan oleh masyarakat itu sendiri. Partisipasi masyarakat merupakan hal yang mendasar di dalam penyusunan rencana yang realistis.

Pada beberapa bagian dunia telah terjadi perubahan paradigma dalam membangun bangsa dan negaranya. Perubahan tersebut cukup mendasar

Tabel 1: Paradigma Pembangunan Lama (“Orthodox Paradigm”) dan Paradigma Pembangunan Baru (“The Alternatif Paradigm”)

ORTHODOX PARADIGM	THE ALTERNATIVE PARADIGMA
Tujuan utama peningkatan GNP	Tujuan utama mengelola SDA menuju pembangunan berkelanjutan
Masyarakat sebagai objek pembangunan	Masyarakat sebagai subjek pembangunan
Profesionalisme diartikan sebagai pemikiran yang pragmatis	Profesionalisme diartikan pemikiran yang bersifat kemanusiaan dan idealistik
Mengedepankan ketergantungan	Mengedepankan pemberdayaan
Mengedepankan teknologi tinggi	Mengedepankan teknologi tepat guna
Lebih mengutamakan “output”	Lebih mengutamakan “outcomes”
Sentralisasi	Desentralisasi
Lebih mengedepankan standarisasi	Lebih mengedepankan fleksibilitas dan keanekaan (variety) sesuai kebutuhan setempat
Lebih mengedepankan industri formal	Lebih mengedepankan industri informal dengan dukungan usaha kecil

Sumber: Laporan Akhir, 2004:11

karena paradigma baru yang lebih menekankan pada aspirasi “akar rumput”, di dalam kebijaksanaan pembangunan bagi dirinya, cukup berbeda jauh dengan kebijaksanaan pembangunan yang dilaksanakan pemerintah Indonesia saat masa lalu, bahkan sampai saat ini. Peran Pemerintah dalam pembangunan yang semula sebagai *provider* (penyedia, pemberi) dirubah menjadi *enabler* (pendorong, pemfasilitasi). Beberapa pakar pembangunan menyebut paradigma lama dengan istilah *orthodox paradigm* sedangkan paradigma baru disebut *the alternatif paradigm*. Perbedaan yang mencolok di antara kedua paradigma tersebut antara lain dapat dilihat pada Tabel 1.

Berdasarkan penjelasan tersebut, paradigma alternatif tampaknya cocok dilaksanakan di Indonesia. Dalam beberapa tahun terakhir, pemerintah mencoba melaksanakan paradigma alternatif tersebut, yaitu kebijaksanaan pembangunan melalui *Pemberdayaan Masyarakat*. Permendagri No.9 tahun 1982 tentang Pedoman Penyusunan Perencanaan dan Pengendalian Pembangunan di Daerah (P5D), pada dasarnya telah membuka ruang bagi partisipasi masyarakat dalam menentukan produk perencanaan sesuai dengan apa yang mereka butuhkan.

Pembangunan partisipatif adalah model pembangunan yang dapat menumbuhkan prakarsa masyarakat, pembangunan yang dihasilkan melalui proses pembelajaran, jaringan atau individu dan kelompok, juga proses pengembangan budaya kelembagaan yang mengatur kemandirian.

Pada pembangunan partisipatif proses pembangunan melibatkan partisipasi masyarakat dalam mekanisme tertentu yang telah disepakati bersama. Suatu metode yang telah dikenal masyarakat dan diberi nuansa baru dengan teknologi baru yang bertujuan untuk memberdayakan masyarakat, merencanakan pembangunan bersama-sama secara musyawarah, mufakat dan gotong royong yang merupakan cara hidup yang telah lama berakar dalam budaya masyarakat. Prinsip pembangunan yang partisipatif menegaskan bahwa rakyat harus menjadi pelaku utama (subjek) dalam pembangunan. Ini membutuhkan kajian strategis

yang lebih intensif tentang restrukturisasi sistem sosial pada tingkat mikro, mezzo dan makro (Hikmat, 2001:101).

Perkembangan pemikiran mengenai pemanfaatan dan peranan komunikasi dalam melaksanakan usaha membangun masyarakat memperlihatkan hubungan yang langsung dengan konsepsi yang dianut dalam merencanakan dan menafsirkan “pembangunan” itu sendiri. Dengan demikian, rumusan tentang pemanfaatan komunikasi ataupun peran yang diharapkan darinya dalam suatu usaha pembangunan amat ditentukan oleh model pembangunan yang dilaksanakan itu sendiri.

Salah satu pendekatan terhadap komunikasi dan pembangunan ditandai dengan penekanan yang eksplisit pada gagasan untuk mengandalkan kemampuan diri sendiri (*self-reliance*). Pendekatan ini mencerminkan keinginan untuk secara strategis memadukan sejumlah ide yang berkaitan dengan pembangunan yang berkembang belakangan ini. Ide-ide tersebut tertuang dalam beberapa hal misalnya:

- (1) Memaksimalkan partisipasi masyarakat
- (2) Memulai dan mendasarkan pembangunan pada masyarakat paling bawah (*grassroot level*)
- (3) Pembangunan secara terpadu.
- (4) Penggunaan teknologi tepat guna (*appropriate technology*)
- (5) Pemenuhan sejumlah kebutuhan dasar (*basic needs*).

Ada empat strategi komunikasi pembangunan yang digunakan selama ini yaitu:

- (1) Strategi-strategi yang didasarkan pada media yang dipakai
- (2) Strategi-strategi disain instruksional
- (3) Strategi-strategi partisipatori
- (4) Strategi-strategi pemasaran (Nasution, 1988 : 104)

Dari empat strategi di atas, salah satu strategi yang relevan dengan kajian nateri tulisan ini adalah *Strategi Partisipatori*, atau strategi partisipasi. Pada strategi ini, prinsip-prinsip penting dalam mengorganisir kegiatan adalah kerjasama

komunitas dan pertumbuhan pribadi (*community participation and personal growth*). Yang dipentingkan dalam strategi ini, bukan pada berapa banyak informasi yang dipelajari seseorang melalui program komunikasi pembangunan tetapi lebih kepada pengalaman keikutsertaan sebagai seseorang yang sederajat (ekual) dalam proses berbagi pengetahuan atau keterampilan.

Karena masyarakat itu dinamis maka penyampaian pesan dalam komunikasi pembangunan tidak selalu dapat diterima, dapat mempengaruhi dan merubah tingkah laku masyarakat sehingga beberapa metode komunikasi pembangunan diantaranya dilakukan melalui pendekatan komunikasi antarpribadi, komunikasi kelompok dan komunikasi massa. Diskusi kelompok merupakan salah satu bentuk dari komunikasi kelompok telah dipercaya orang sebagai metode yang dapat membantu terciptanya komunikasi pembangunan yang efektif.

Sebagian besar literatur perihal diskusi sepakat bahwa diskusi melibatkan sejumlah kecil individu-individu yang berinteraksi satu sama lain beberapa kali dalam kelompok tatap muka. Oleh karena itu, secara tradisional diskusi telah dipandang sebagai kegiatan pemecahan masalah, sebagai proses yang melibatkan dua atau lebih manusia yang saling berkomunikasi secara lisan dalam kelompok tatap muka yang kecil dimana peserta mempunyai tujuan bersama. Mereka mencari saling pengertian atau tindakan; interaksi yang sistematis dan dilakukan di bawah pengarahan seorang pemimpin.

Salah satu definisi diskusi dalam hal ini dikemukakan oleh Bormann yang dinyatakan secara eksplisit bahwa diskusi adalah, "Pembicaraan yang teratur dan sistematis tentang topik khusus yang jelas, dimana orang-orang yang terlibat dalam diskusi mempunyai tujuan yang sama dan berjuang untuk mencapai tujuan tersebut". (Goldberg, 1985 : 78)

Kesimpulan dari definisi Bormann menyatakan bahwa peserta diskusi berkomunikasi untuk memenuhi tujuan bersama serta mencapai sasaran kelompok. Sasaran khusus dari diskusi, menurut berbagai buku, adalah memperoleh suatu kejelasan

dan pengertian atau mengadakan tindakan. Selain itu, juga terdapat kesepakatan pendapat bahwa kerjasama diantara anggota-anggota kelompok diskusi adalah unsur hakiki dalam diskusi.

Diskusi sebagai komunikasi kelompok memiliki beberapa kegunaan seperti dikutip dari pendapat Surono bahwa diskusi berguna untuk :

- (1) Melatih berani mengemukakan pendapat sendiri dan berpikir secara kritis, tepat, logis dan obyektif.
- (2) Belajar menghargai pendapat orang lain untuk mencari kesimpulan yang benar.
- (3) Membentuk diri peserta selain menambah pengetahuan dan pengalaman juga semangat demokrasi dan toleransi.
- (4) Membuka cakrawala akan kenyataan di sekeliling untuk memperluasnya menurut yang benar dan mendorong untuk bertindak (Surono, 1979 : 9)

Melalui diskusi dapat menumbuhkan pula kemampuan dari para anggota kelompok untuk mengerti dan menerima ide/gagasan baru secara mendalam selain dapat memperluas pengetahuan juga toleransi serta kebebasan pribadi para anggota kelompok. Pakar lain berpendapat bahwa dengan diskusi akan mencapai dua maksud sekaligus yaitu:

- (1) Menciptakan iklim yang memudahkan penerimaan materi dan meningkatkan kemampuan berpikir untuk memecahkan persoalan.
- (2) Memungkinkan orang-orang yang memiliki pengetahuan yang luas dan beranekaragam mengutarakannya dalam diskusi sehingga berguna untuk meningkatkan pengetahuan peserta diskusi yang lainnya (Abdurahman, 1982:1).

Sementara itu, Stermending memberikan pendapat tentang tujuan diskusi adalah menimbulkan perubahan dalam diri manusia itu sendiri dalam hal nilai, sikap atau pendapat yang selama ini tersembunyi dalam diri masing-masing anggota kelompok. Pendapatnya secara lengkap tergambar dalam kutipan berikut:

- (1) Diskusi menyadarkan pendapat sendiri karena

-
- dihadapkan dengan pendapat orang lain.
- (2) Mempertajam pendirian sendiri akibat berkonfrontasi dengan pendapat orang lain. Dalam hal ini, orang akan lebih menyadari secara jelas inti pendiriannya itu dimana dapat mengarah pada peninjauan kembali atau perubahan pendapat, nilai dan pendirian sendiri (Stermending, 1973:76).

Dari beberapa kutipan di atas dapat disimak bahwa diskusi merupakan suatu metode komunikasi kelompok yang banyak sekali memiliki manfaat bagi peserta dan peranan peserta sangat penting dalam tercapainya kelancaran/efektifitas diskusi.

Dalam sebuah diskusi terdapat cara pemecahan masalah yang disebut dengan *Proses Berpikir Reflektif* (Mc Burney dan Hance). Prosedur tersebut pada umumnya melibatkan beberapa atau semua langkah-langkah berikut:

- (1) Identifikasi masalah, dimana untuk memecahkan masalah secara efektif, anggota kelompok harus setuju tentang apa masalahnya, serta mengerti dengan baik.
- (2) Analisis masalah adalah menganalisis atau mendiagnosis kesulitan-kesulitan dengan cara meneliti masalah tersebut sedapat mungkin. Secara keseluruhan, langkah kedua ini, pada dasarnya adalah fase pengumpulan data sebab langkah ini melibatkan pengumpulan dan pembagian informasi tentang sebab timbulnya masalah, sejarahnya, faktor-faktor yang mempengaruhi masalah, manifestasi masalah dan lain-lain.
- (3) Kriteria, untuk mengevaluasi cara pemecahan masalah, adalah adanya standar-standar untuk memberi cara-cara pemecahan masalah.
- (4) Kemungkinan-kemungkinan cara pemecahan masalah dan akibat-akibatnya adalah identifikasi kemungkinan-kemungkinan pemecahan masalah, keuntungan, kerugian, dan mempertimbangkan secara hati-hati akibat dari penerapan masing-masing cara pemecahan tersebut.
- (5) Pemilihan dan uji coba atas pemecahan yang terbaik ialah untuk menyetujui cara pemecahan yang terbaik dan kalau mungkin

menguji cara pemecahan masalah tersebut (Goldberg, 1985 : 93-95).

Diskusi kelompok yang terarah digunakan untuk membahas persoalan-persoalan yang terjadi diantara kelompok-kelompok atau organisasi sosial masyarakat. Dalam diskusi ini, dikemukakan pula kiat-kiat mendayagunakan potensi sosial dan penciptaan interaksi komunikatif dengan sumber-sumber sosial. Fokus perhatian diskusi ini adalah mengamati proses dialog yang dilakukan antara unsur-unsur masyarakat dalam rangka:

- (1) persiapan untuk bekerja bersama
- (2) pembentukan kemitraan antar berbagai pihak
- (3) artikulasi tantangan
- (4) identifikasi kekuatan dan
- (5) penentuan arah kegiatan (Hikmat, 2001 : 243)

Pembahasan

Peranan “Focus Group Discussion” Paradigma Pembangunan Partisipatif

Komunikasi pembangunan bertujuan untuk menciptakan kondisi sosiokultural yang mantap dan dinamis sehingga setiap individu dalam masyarakat mau dan mampu mengembangkan potensi manusiawinya secara optimal. Secara kuantitatif, tujuan komunikasi pembangunan mampu menjangkau masyarakat seluas mungkin, dan secara kualitatif mampu menumbuhkan dan membina kesadaran masyarakat untuk berpartisipasi dalam pembangunan. Komunikasi pembangunan arahnya tidak hanya agar masyarakat aktif membangun secara fisik, akan tetapi juga untuk tujuan pengembangan pola berpikir masyarakat yang lebih kreatif, produktif dan dinamis.

Focus Group Discussion, atau disingkat FGD yang berarti *Diskusi Kelompok Terarah*, adalah salah satu metode komunikasi pembangunan yang dipopulerkan oleh para ahli pemberdayaan masyarakat dan *Participatory Rural Approach* (PRA). FGD makin akrab terdengar di telinga seiring dengan dicanangkannya paradigma pembangunan partisipatif.

Dalam masyarakat, esensi istilah ini sebetulnya sudah tidak asing lagi disebut sebagai “Rembug

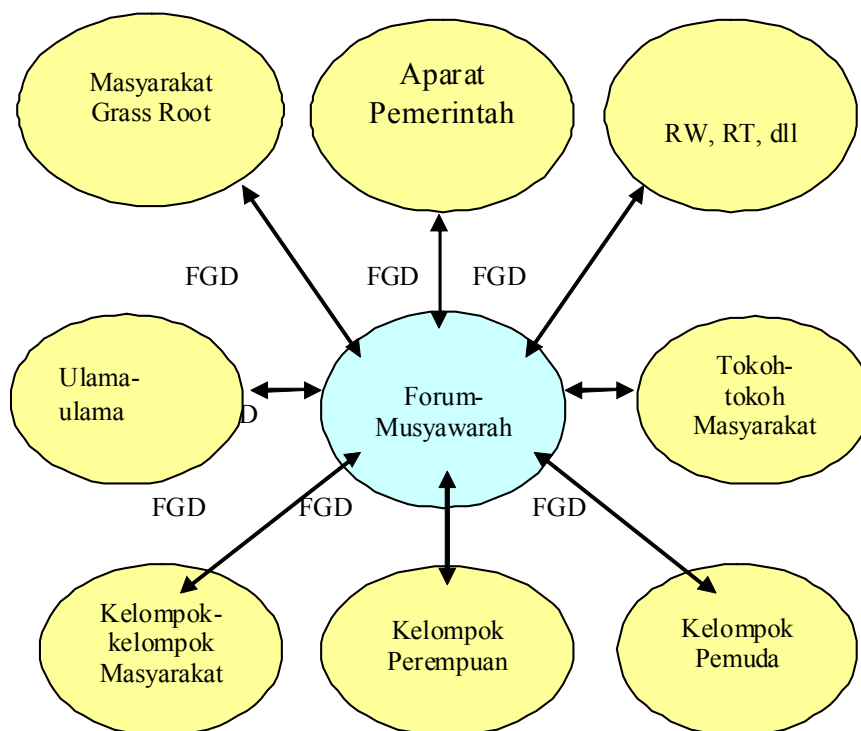
Warga” yakni tradisi gotong royong yang sudah sejak lama mengakar pada masyarakat kita. Pada konteks komunikasi, istilah inipun sudah lama dikenal sejalan dengan perkembangan komunikasi lisan, yaitu *Diskusi Kelompok*, kalaupun ada modifikasi adalah melekatnya kata “*Terarah*” yang menandakan adanya suatu “Fokus” tertentu dalam diskusi yang dilakukan. Namun, esensinya tetap sama seperti yang dimaksud dalam diskusi kelompok pada konteks komunikasi. Pada penelitian kualitatif, FGD merupakan sebuah teknik pengumpulan data untuk memperoleh data dari suatu kelompok berdasarkan hasil diskusi yang terpusat pada suatu permasalahan tertentu (Bungin, 2004 :177)

Focus Group Discussion, merupakan proses yang melibatkan partisipan-partisipan, dimana mereka melakukan pertukaran pesan secara

dialogis dalam kerangka pemahaman bersama atas situasi sosial. (Birowo, 2004 : 127) Oleh karena itu, dalam FGD, dialog merupakan kunci bagi cara pemecahan masalah yang terjadi dalam masyarakat yang berorientasi pada partisipan (subjek). Maka, peran fasilitator amat penting dalam menciptakan situasi komunikasi yang menyenangkan bagi para partisipan dalam memecahkan masalah sehingga semua unsur masyarakat merasakan sumbangsih sarannya atas permasalahan yang tengah terjadi dilingkungkannya.

Di masa lalu, konsep pembangunan mengisyaratkan keterlibatan masyarakat hanya berfokus pada kelompok tertentu seperti aparat pemerintah, tokoh-tokoh masyarakat formal juga RT dan RW (gambar 1 hal 4), peranan diskusi hanya terfokus pada forum rakorbang (rapat koordinasi pembangunan) yang sifatnya linear. Namun apabila

Gambar 3
Peranan FGD dalam Paradigma Pembangunan Partisipatif



kita menyimak konsep baru paradigma pembangunan (gambar 2 hal 4) keterlibatan masyarakat tampak datang dari semua unsur (stakeholder) baik itu dari masyarakat grass root, aparat pemerintah, RT, RW, ulama-ulama, kelompok-kelompok masyarakat, kelompok perempuan, kelompok pemuda bahkan tokoh-tokoh masyarakat yang sifatnya lebih interaktif.

Oleh karena itu, FGD sangat memungkinkan dilakukan oleh masing-masing unsur masyarakat dimana hasilnya didiskusikan lebih lanjut pada forum masyarakat tanpa menanggalkan proses maupun *output* FGD yang telah dilakukan pada tiap-tiap unsur, sehingga semuanya terintegrasi dalam sebuah perencanaan yang lebih komprehensif berdasarkan kebutuhan semua unsur masyarakat. Visualisasi peranan FGD tersebut dapat dilihat dalam gambar 3.

Dalam strategi komunikasi pembangunan partisipatori, prinsip-prinsip penting dalam mengorganisir kegiatan adalah kerjasama komunitas dan pertumbuhan pribadi. FGD memiliki peluang dalam menciptakan kerjasama diantara komunitas-komunitas yang ada di dalam masyarakat karena FGD:

- (1) Dapat menjadi tempat konsultasi untuk menambah pengetahuan, mendapat informasi, meluaskan pengalaman dan membuka pandangan. Disamping itu ia menjadi tempat koordinasi karena adanya kontak dan komunikasi.
- (2) Dapat menjadi tempat untuk mendapatkan pengakuan/penghargaan, menampilkan kelompok atau individu, menyatakan partisipasi, memberikan dan mendapat informasi serta menunjukkan interaksi.
- (3) Dapat menjadi tempat tukar menukar informasi, tempat mempertajam pengertian dan pendapat, ia menjadi tempat menyiasati, menganalisis, menyelesaikan masalah memberikan motivasi dan keyakinan/persesuaian, mengembangkan kerjasama dan meramalkan partisipasi. (Fardiah, 1999:61)

Secara spesifik beberapa peran yang dapat dijalankan oleh FGD sebagai metoda komunikasi

dalam paradigma pembangunan partisipatif adalah:

- (1) Diskusi yang dilakukan merupakan proses belajar bagi masyarakat untuk membuat kegiatan bersama.
- (2) Kegiatan yang disusun akan menumbuhkan perasaan kebersamaan karena dilakukan bersama dan menimbulkan perasaan tanggung jawab, karena mengutamakan kepentingan wilayah setempat.
- (3) Membangun proses pembelajaran bagi warga, dalam mengidentifikasi kebutuhan bersama, menyusun rencana tindak yang strategis dan realistis, serta membangun solidaritas antar warga;
- (4) Memunculkan kepedulian dari masyarakat tentang pentingnya partisipasi dalam proses perencanaan pembangunan di wilayahnya, untuk turut: mengontrol, melaksanakan, dan merawat proses pelaksanaan pembangunan yang telah direncanakan;
- (5) Mendorong munculnya kerjasama yang erat antara masyarakat, pemerintah, dan swasta, dalam proses pelaksanaan kegiatan.

Proses “Focus Group Discussion” dalam Paradigma Pembangunan Partisipatif

Dalam sebuah diskusi kelompok prosedur yang dapat dilaksanakan agar diskusi berjalan secara efektif adalah dengan cara berpikir reflektif menurut langkah-langkah yang telah dijabarkan dalam kerangka pemikiran.

Pada konteks pembangunan partisipatif proses berpikir reflektif tersebut secara prinsipil dapat dilaksanakan di dalam proses FGD dengan menetapkan langkah-langkah sebagai berikut:

- (1) **Penjajagan Kebutuhan / Masalah**
Penjajagan kebutuhan seringkali disebut sebagai pengenalan masalah, karena biasanya masyarakat memiliki kebutuhan untuk mengatasi masalah-masalah yang mengganggu pemenuhan kesejahteraan hidupnya. Pengkajian masalah ini disertai dengan pengenalan potensi masyarakat, terutama bila program yang dikembangkan bertujuan untuk mengembangkan kemampuan keswadayaan

masyarakat. Pada tahap awal ini yang bisa dikaji adalah informasi-informasi yang mengungkapkan keberadaan lingkungan dan masyarakatnya secara umum serta melakukan analisis atas keadaan masyarakat tersebut. Tujuan utama dari penjajagan kebutuhan adalah memfasilitasi masyarakat untuk memahami keadaan dan lingkungan mereka dipandang dari kacamata masyarakat. Proses ini diharapkan menjadi proses pembelajaran untuk penguatan kemampuan analisis masyarakat. Penekanan pada tahap penjajagan kebutuhan adalah pemahaman bersama terhadap akar permasalahan mereka untuk kemudian dicarikan jalan pemecahannya. Dalam pemecahan masalah masyarakat didorong untuk mempertimbangkan tidak hanya satu alternatif. Alternatif permasalahan dan dapat dilakukan oleh masyarakat.

(2) **Analisis Masalah**

Dalam menganalisis permasalahan dapat dilakukan dengan cara menggunakan analisis SWOT, sebagai salah satu cara dalam mengevaluasi permasalahan dengan melihat dari berbagai sudut pandang secara komprehensif yang didalamnya menggali seberapa jauh hal-hal yang berhubungan dengan masyarakat bisa ditelaah, diharapkan setelah dievaluasi akan ditemukan solusi yang mungkin bisa menjadi hal yang bermanfaat bagi semua unsur masyarakat. Analisis SWOT merupakan metode yang dapat digunakan juga secara luas untuk mengetahui situasi dan kondisi secara intern dan ekstern yang dihadapi masyarakat.

Cara lain adalah dengan membuat “Ponon Masalah” yang dapat digambarkan dalam contoh kasus pada gambar 4.

(3) **Perencanaan Kegiatan**

Perencanaan kegiatan merupakan proses penjajagan kebutuhan yang telah dilakukan. Hasil kajian masalah, kebutuhan dan potensi masyarakat dijadikan bahan untuk menyusun rencana kegiatan yang sederhana, jelas dan realitis. Artinya bentuk ini benar-benar dapat

dilaksanakan oleh masyarakat.

Rencana yang dikembangkan perlu mencantumkan dengan jelas apa, bagaimana, siapa dan kapan akan dilaksanakan kegiatan tersebut. Semakin konkrit dan jelas rencana yang dihasilkan, semakin besar kemungkinan rencana itu akan dilakukan. Penyusunan masyarakat sendiri melalui forum diskusi.

(4) **Pelaksanaan / Pengorganisasian Kegiatan**

Sebaik-baiknya suatu rencana dikembangkan, hanya akan berarti apabila rencana tersebut diterapkan. Pelaksanaan kegiatan seharusnya diorganisir dan dipimpin oleh anggota masyarakat.

Dalam pelaksanaan program, pelaksanaan kegiatan sangat tergantung kepada apa yang telah disepakati bersama oleh masyarakat ketika melakukan perencanaan. Masyarakat didorong untuk memiliki prioritas pemecahan masalah sendiri dan penyelenggara program tidak bisa memaksakan kegiatan dilaksanakan oleh masyarakat terutama apabila prioritas pemecahan masalah mereka tidak sesuai dengan kepentingan program.

Dalam menentukan prioritas pemecahan masalah misalnya dapat diajukan beberapa kriteria atas dasar:

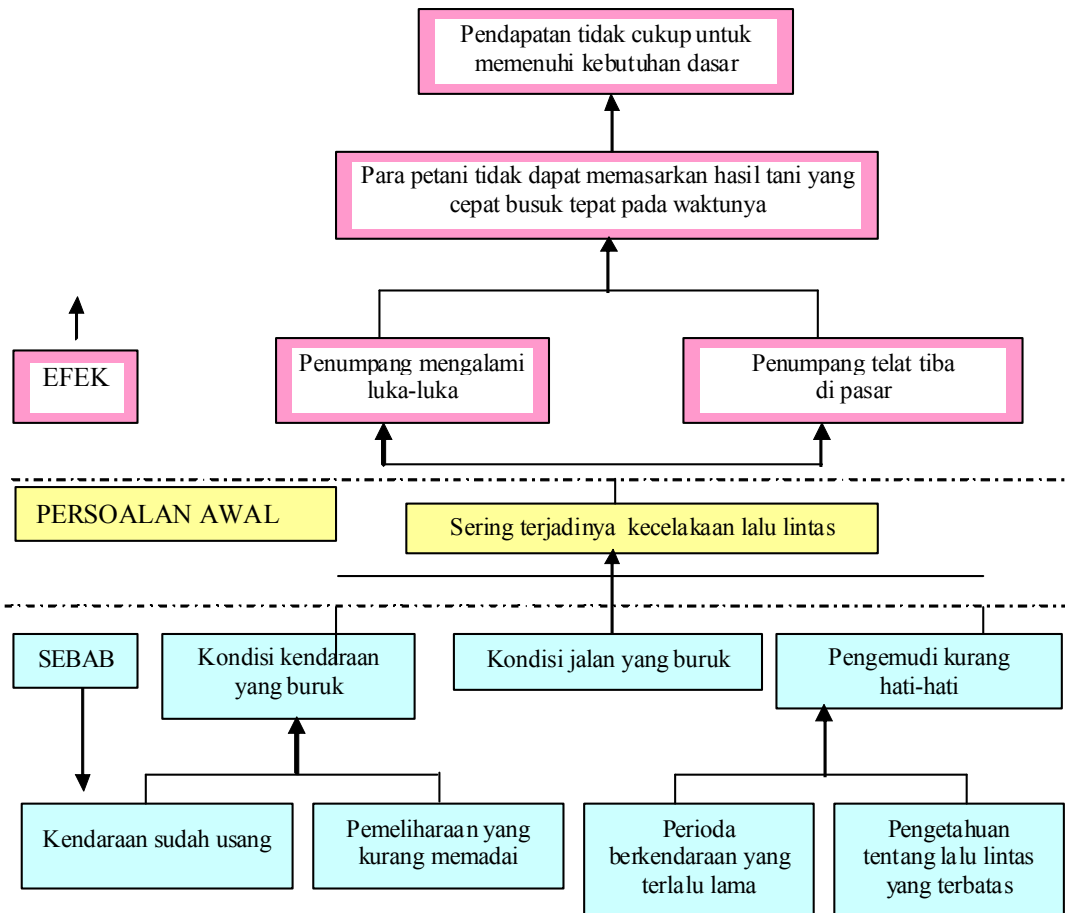
- (1) Seberapa besar dampak positif dan negatif yang dialami masyarakat (nilai manfaat)
- (2) Seberapa jauh tingkat keterdesakan (urgensi)
- (3) Sejauhmana permasalahan terkait dengan sistem yang lebih luas
- (4) Besarnya dana/biaya.

5. **Pemantauan (Monitoring)**

Kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan sejak awal perlu dipantau terus menerus untuk melihat apakah rencana yang telah disusun bersama dilaksanakan; dan hambatan-hambatan yang terjadi pada saat pelaksanaan penyimpangan yang terjadi perlu dipelajari dan diperbaiki agar tetap dapat mencapai tujuan akhir yang diinginkan.

Monitoring ini bertujuan untuk menilai apakah program memang berjalan pada arah yang

Gambar 4: Contoh Analisis Pohon Masalah



Sumber : IPGI-Indonesian Partnership Government Independence

benar, mengidentifikasi permasalahan dalam pelaksanaan program dan kegiatan, memperkirakan antisipasi yang dibutuhkan untuk menjaga alur pelaksanaan program.

6. Evaluasi

Setelah suatu tahapan selesai maka hasilnya layak untuk dievaluasi atau dinilai sejauh mana telah mencapai tujuan program yang telah

disepakati bersama oleh masyarakat. Evaluasi yang baik adalah yang dilakukan oleh masyarakat sendiri yang merasakan manfaat dari kegiatan yang dikembangkan.

Evaluasi kegiatan dimaksudkan sebagai proses belajar bersama untuk menilai pencapaian hasil kegiatan, kesesuaian rencana dan tindakan serta mengidentifikasi permasalahan yang muncul secara terus menerus.

Kendala-Kendala Penggunaan Metode “Focus Group Discussion” dalam Paradigma Pembangunan Partisipatif

Sejak 1997-an akhir hingga kini, Indonesia telah mengalami berbagai tragedi yang memilukan hati dan menegangkan jiwa. Tragedi tersebut dipicu dan dipacu oleh krisis moneter menjadi krisis ekonomi dan berdampak luas pada semua bidang pembangunan menjadi krisis sosial, politik dan budaya yang akhirnya pembangunan mengalami distorsi yang sangat parah.

Pendekatan sentralistik di semua bidang pembangunan sebelum terjadi krisis semakin memperparah keadaan. Akibatnya, masyarakat kehilangan daya responsivitas dan kreatifitasnya dalam membangun masa depan dirinya. Ini mengindikasikan bahwa dalam kehidupan masyarakat telah terjadi ketidakberdayaan (*powerless*) untuk menghadapi perubahan dan permasalahan di satu pihak dan semakin besarnya akumulasi frustrasi sosial dan kekecewaan berbagai unsur masyarakat di lain pihak.

Gambaran fenomena di atas berimplikasi pada sikap masyarakat dalam merespon niat baik pemerintah untuk melibatkan mereka dalam proses pembangunan partisipatif. Oleh karena itu, tidak heran kalau beberapa kendala dijumpai pada pelaksanaan metode FGD, diantaranya:

- (1) Selama ini, masyarakat merasa jenuh dengan perencanaan-perencanaan pembangunan yang diadakan pemerintah yang acapkali tidak ada realisasinya sehingga masyarakat menjadi apatis terhadap kegiatan FGD. Masyarakat menganggap kegiatan FGD hanya membuang-buang waktu dan bukan urusan mereka.
- (2) Secara psikologis masyarakat terbiasa “dicekoki” oleh perencanaan pembangunan yang datangnya secara “Top Down” sehingga masyarakat belum siap bertindak sebagai “Subjek” dalam pembangunan. Terjadinya pergeseran peran “Objek” pembangunan menjadi “Subjek” pembangunan dianggap sebagai suatu hal yang tidak lazim.
- (3) Masyarakat tidak memiliki kemampuan dan

keberanian dalam mengekspresikan “diri” dalam proses FGD sehingga dominasi pembicaraan hanya terfokus pada kelompok-kelompok tertentu saja.

- (4) Format waktu diskusi seringkali pula menjadi kendala dalam pelaksanaan FGD. Diskusi tentang permasalahan yang ada di masyarakat membutuhkan waktu yang kontinyu, hal ini mengakibatkan masyarakat merasa terbebani untuk terus secara rutin mendiskusikan permasalahan yang ada dilingkungannya.

Kesimpulan

Dari hasil analisis pada pembahasan dilandasi teori-teori yang digunakan dalam kerangka pemikiran maka dapat disimpulkan bahwa:

- (1) FGD memiliki peranan penting dalam paradigma pembangunan partisipatif karena dalam FGD memungkinkan adanya interaksi, komunikasi dan proses pembelajaran bagi masyarakat sehingga terwujud suasana kebersamaan atas permasalahan yang ada dalam lingkungannya.
- (2) Proses FGD dapat memberikan peluang kepada masyarakat untuk berperan secara aktif dalam menggali potensi dan masalah yang ada di lingkungannya melalui proses berpikir reflektif yang meliputi identifikasi masalah, analisis masalah, perencanaan kegiatan, pelaksanaan kegiatan, pemantauan dan evaluasi kegiatan pembangunan.
- (3) Pada pelaksanaannya, penggunaan metode FGD dalam paradigma pembangunan partisipatif memiliki beberapa kendala dari sisi pemahaman masyarakat, kesediaan masyarakat, kesiapan masyarakat dalam melibatkan diri dalam proses FGD.

Rekomendasi

Menurut penjabaran fenomena tentang FGD dalam paradigma pembangunan partisipatif maka ada beberapa hal yang dapat direkomendasikan diantaranya:

- (1) Perlu adanya stimulan berupa pendampingan

atau kegiatan fasilitasi bagi masyarakat baik dari pihak pemerintah maupun elemen-elemen lain agar FGD berjalan secara efektif dan efisien.

- (2) Adanya sosialisasi rencana pembangunan secara komprehensif sehingga masyarakat paham akan peran dan fungsinya dalam konteks pembangunan partisipatif termasuk keterlibatannya dalam kegiatan FGD.

Daftar Pustaka

- Abdurahman, DH. Diskusi Sebagai Alat Untuk Memecahkan Masalah. 1982. Karya Nusantara Bandung.
- Birowo, M. Antonius. 2004. Metode Penelitian Komunikasi, Citanyali, Yogyakarta.
- Bungin, Burhan. 2003. Metode Penelitian Kualitatif, Rajawali Pers, Jakarta.
- Fardiah, Dedeh. 1999. Pengaruh Diskusi Kelompok Terhadap Pencapaian Tujuan Pribadi Muslim Dalam Meningkatkan Pengetahuan Agama, Thesis, Program Pascasarjana Universitas Padjadjarab, Bandung.
- Goldberg, Akvin & Carl E Larson. 1985. terj. Koesdarini Soemiatie & Gary R. Jusuf, Komunikasi Kelompok (Proses-Proses Diskusi dan Penerapannya), UI-Press, Jakarta.
- Hikmat, Harry. 2001. Strategy Pemberdayaan Masyarakat, Humaniora Utama Press Bandung.
- Nasution, Zulkarimein. 1998. Komunikasi Pembangunan (Pengenalan Teori dan Penerapannya), Rajawali Pers, Jakarta.
- Surono, Y.G. 1979. Petunjuk Penyelenggaraan Rapat dan Rapat Modern, Intan, Jakarta.
- Stermending. 1977. Teknik Rapat dan Diskusi Kelompok, Balai Aksara, Jakarta.
- Lembaran Daerah Kabupaten Bandung. 2001. Nomor 40 tentang Peraturan Daerah dan pola Dasar Pembangunan Daerah tahun 2001-2005, Bagian Hukum Setda, Kabupaten Bandung.
- Modul Pelatihan Tim Survey Kampung Sendiri. 2004. Fasilitasi Perencanaan Rencana Pembangunan Menengah, Dinas Kimtawil, Kabupaten Bandung.
- Modul Sosialisasi dan Pelatihan Penyusunan RP4D. 2001. Departemen Permukiman dan Prasarana Wilayah, Ditjen Perkim, Jakarta.
- Laporan Akhir. 2004. Fasilitasi Perencanaan Pembangunan Partisipatif, Dinas Kimtawil Kabupaten Bandung,
- Makalah tentang Community Action Plan. 2004. Indonesian Patnership Government Independence (IPGI) Bandung.